

Court, Court of Appeal and Supreme Court. Except judges on the Supreme Court amounted to 51, the rest are spread in all provinces and districts/ cities in Indonesia. Commission has established networks in 30 provinces in order to strengthen the institutional capacity. The networks are consisted by universities, NGOs, and mass organizations (especially Muhammadiyah, NU, and the bishoptic). They are strategic partners and social capital for the Commission in performing its duties and authorities. The establishment of this network is as an active participation of civil society

**Human Rights Training for Judicial Commission's Network**



**A. Background**  
The Judicial Commission is a state institution that is relatively new. In such situation, the Judicial Commission dealt with complex issues. The complexity of these problems caused by, among others,

the Judicial Commission established only at national level, besides the limited human resources while the number of judges should be supervised by the Commission is about 6,900 consisted of judges from District

**Pelatihan Hak Asasi Manusia bagi Jejaring Komisi Yudisial**

**A. Latarbelakang**

Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang relatif masih baru. Di dalam situasi tersebut Komisi Yudisial dihadapkan kepada berbagai permasalahan yang kompleks. Kompleksitas permasalahan tersebut antara lain



disebabkan oleh keberadaan Komisi Yudisial yang hanya di tingkat pusat selain keterbatasan sumber daya manusianya. Padahal jumlah hakim yang harus dilakukan pengawasan oleh Komisi Yudisial berjumlah sekitar 6900 orang yang terdiri dari hakim di pengadilan tingkat

pertama dan tingkat banding, serta hakim agung di Mahkamah Agung. Selain hakim agung di Mahkamah Agung berjumlah 51, selebihnya tersebar di seluruh propinsi dan daerah kabupaten/kota se Indonesia.

Pada konteks keterbatasan itulah Komisi Yudisial dalam rangka memperkuat kapasitas kelembagaannya telah membentuk jejaring di 30 Propinsi. Jejaring yang terdiri dari unsur perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi massa (terutama

Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Keuskupan) ini adalah mitra strategis dan modal sosial yang dimiliki oleh Komisi Yudisial dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Pembentukan jejaring ini merupakan wujud pelibatan partisipasi aktif unsur-

unsur masyarakat sipil (*civil society*) dalam mendorong akselerasi reformasi peradilan demi terwujudnya peradilan yang bersih, akuntabel dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Tujuan dapat dicapai dengan adanya upaya untuk memperkuat basis intelektual maupun kapasitas teknis di bidang hukum bagi para jejaring. Oleh karenanya, Komisi Yudisial bekerjasama dengan Norwegian Center for Human Rights (NCHR) Universitas Oslo Norwegia dan Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) telah mengadakan pelatihan pemahaman hukum formil, materil dan doktrin dalam perspektif hak asasi manusia bagi jejaring Komisi Yudisial tersebut. Pelatihan ini dilakukan dengan tujuan (1) untuk meningkatkan kualitas dan pemahaman jejaring atas hukum formil, materil dan doktrin hukum dalam perspektif hak asasi manusia; (2) untuk

meningkatkan kapasitas pemahaman secara komprehensif tentang peran jejaring sebagai bagian dari dan untuk penguatan peran kontrol Civil Society Organization (CSO) dalam agenda penguatan norma-norma dan nilai-nilai hak asasi manusia dan (3) untuk membekali kemampuan melakukan investigasi terhadap penyimpangan perilaku para hakim kepada para jejaring Komisi



Yudisial.

**B. Deskripsi**

Kegiatan ini berupa pelatihan yang telah diselenggarakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama dilaksanakan di Bali, 23-26 Juni 2010 dan kedua dilaksanakan di Hotel Holiday Inn Bandung, 30

increase the comprehensive of network as part of and for strengthening the role control of Civil Society Organization (CSO) on the agenda of norms strengthening and values of human rights and (3) to equip with the ability to



investigate for the network on the behaviour irregularities of judges.

**B. Description**

This activity have been held as many as two times, the first was held in Bali, 23 to 26 June 2010 and the second was held at the Hotel Holiday Inn Bandung, June 30-July

elements in urging the acceleration of reform for a clean, accountable and uphold human rights judicial system. The goal can be achieved by strengthening the intellectual and technical capacity of law for the network. Therefore, the

Commission in Norwegian Centre for Human Rights (NCHR) University of Oslo and Centre for Human Rights Studies Islamic University of Indonesia (PUSHAM UII) has had training on formal, materil, and the doctrine on legal understanding in the perspective of human rights for the networks. The training is conducted with the aim of (1) to improve the quality and understanding of the network over legal formal, materil and doctrine in human rights perspective, (2) to

increase the comprehensive of network as part of and for strengthening the role control of Civil Society Organization (CSO) on the agenda of norms strengthening and values of human rights and (3) to equip with the ability to

Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.A., Ph.D., Dr. Johannes Johansah, S.H., M.H., Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Drs. H. Tarman Azam, Prof. Amzulian Rifa'i, Ph.D., and Hermansyah, S.H. In arranging this training, Centre for Human Rights Studies Islamic University of Indonesia cooperated with the Judicial Commission with support from Norwegian Centre for Human Rights (NCHR) University of Oslo, Norway.

3, 2010. Each of training was attended by thirty participants from various NGOs, religious and social organizations and from various universities. The invited spoke persons are Dr. M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum, Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si., Ifdhal Kasim, S.H., Rudi M. Rizki, S.H., M.H., Dr. Bambang Widjoyanto, S.H., M.H., Prof. Dr. Mustara Abdullah, S.H., Soekotjo Soeparto, S.H., M.H., Fajrul Falaakh, S.H., M.A., LL.M., Prof.

Juni-3 Juli 2010. Masing-masing training diikuti oleh 30 orang peserta yang berasal dari berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi sosial keagamaan dan dari kalangan perguruan tinggi. Training ini melibatkan beberapa pakar sebagai narasumber antara lain Dr. M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum, Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si., Ifdhal Kasim, S.H., Rudi M. Rizki, S.H., M.H., Dr. Bambang Widjoyato, S.H., M.H., Prof. Dr. Mustafa Abdullah, S.H., Soekotjo Soeparto, S.H., M.H., Fajrul

Falaakh, S.H., M.A., LL.M., Prof. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.A., Ph.D., Dr. Johannes Johansah, S.H., M.H., Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Drs. H. Tarman Azam, Prof. Amzulian Rifa'i, Ph.D., dan Hermansyah, S.H. Training ini terlaksana atas kerjasama antara Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta dan Komisi Yudisial Republik Indonesia dengan dukungan dari Norwegian Center for Human Rights (NCHR) Universitas Oslo, Norwegia.

### Pelatihan HAM Dasar untuk Dosen Baru Gelombang I

#### A. Latarbelakang

Kemajuan perhatian kelompok-kelompok masyarakat strategis, khususnya dosen dan aktivis LSM terhadap hak asasi manusia di Indonesia sepuluh tahun terakhir ini cukup signifikan, terutama bila diukur dengan meningkatnya



tulisan-tulisan tentang hak asasi manusia di koran dan jurnal,

pertemuan-pertemuan ilmiah dalam bentuk seminar dan lokakarya serta demonstrasi-demonstrasi yang mempersoalkan dan atau menuntut dipenuhi atau ditegakannya hak asasi manusia. Namun demikian, mispersepsi tentang hak asasi manusia masih sering terjadi. Banyak pihak masih belum memahami hak asasi manusia dengan baik sehingga berpandangan bahwa hak asasi manusia identik dengan kebebasan tanpa batas dan anti pemenuhan kewajiban. Sebuah diskursus yang sangat awal.

Untuk mengatasi persoalan di atas, maka diseminasi hak asasi manusia harus terus dilakukan. PUSHAM UII melihat bahwa dosen adalah aktor yang sangat strategis untuk mendiseminasikan hak asasi manusia kepada mahasiswa, harapannya dalam jangka panjang mispersepsi itu tidak akan terjadi lagi dan akhirnya hak asasi manusia dapat terpenuhi dan terhormati

dengan baik di Indonesia. Oleh karena itu, pelatihan tentang hak asasi manusia di kalangan dosen di Indonesia menjadi penting untuk dilakukan dalam mendukung proses transisi yang sedang berjalan sekarang ini. Pendek kata, kendala kultural yang diduga menjadi penghambat proses deseminasi hak asasi manusia diharapkan dapat dikikis melalui keberadaan dosen yang memiliki bekal yang cukup dalam membenai pemahaman dan praktik nyata penghargaan dan penghormatan pada hak asasi manusia secara lebih nyata.

#### B. Kegiatan

Training ini dilaksanakan pada 3-6



PUSHAM UII consider the lecturers as a very strategic actors to disseminate human rights to the students, with expectation in long term that such misperceptions will no longer exists, and finally human rights can be met and well-respected in Indonesia. Therefore, training on human rights for lecturers in Indonesia is important to support the ongoing transition process. In short, the cultural barriers that allegedly inhibited human rights dissemination process is expected to be eroded by lecturers who have



Attention of strategic community groups, especially lecturers and NGO activists toward human rights in Indonesia last ten years is significantly increasing, especially when measured by the number of articles of human rights in various newspapers and journals, scientific meetings and protests which are questioning or demanding the human rights to be enforced. However, misperceptions about human rights are still common. Many people have inadequate understanding on human rights and even seeing human rights is synonymous with limitless freedom and deny fulfillment of obligations: a very superficial discourse. To address such issues, then the dissemination of human rights should continuously extend.

#### Human Rights Basic Training Batch 1

#### A. Background

The training is performed in collaboration between the Centre for Human Rights Studies Islamic University of Indonesia (PUSHAM UII) in Yogyakarta and the Norwegian Centre for Human Rights (NCHR) University of Oslo, Norway.



spoke persons were, Prof. Dr. Satya Arinanto, Kjetil F. Alvsaker, Rudi M. Rizki, S.H., M.H., Abdul Hakim Garuda Nusantara, S.H., LL.M., Sri Palupi, Prof. Dr. Dra. Sulistyowati Irianto, M.A., Mohammad Farid, Ifdhal Kasim, S.H., Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si., Enny

The training was held on 3-6 August 2010 at Santika Hotel, Makassar, South Sulawesi. It was attended by 40 human rights law lecturers from various universities in Indonesia. Since it was a basic training, then the materials conveyed are more about introduction to human rights from philosophy and history point of view besides several main human rights instruments. Presented



adequate capability in refining the understanding and practice of human rights appreciation and respect for in a more tangible way.

**B. Description**

Agustus 2010 bertempat di Hotel Santika, Makasar, Sulawesi Selatan. Training ini diikuti oleh 40 orang dosen pengajar mata kuliah hukum



hak asasi manusia yang berasal dari fakultas hukum di berbagai universitas se-Indonesia. Training ini merupakan training dasar sehingga materi yang disampaikan lebih banyak adalah pengenalan hak asasi manusia dari sisi filosofis, historis hingga beberapa instrumen pokok hak asasi manusia. Narasumber yang hadir pada training ini antara lain Prof. Dr.

Satya Arinanto, Kjetil F. Alvsaker, Rudi M. Rizki, S.H., M.H., Abdul Hakim Garuda Nusantara, S.H., LL.M., Sri Palupi, Prof. Dr. Dra. Sulistyowati Irianto, M.A., Mohammad Farid, Ifdhal Kasim, S.H., Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si., Enny Soeprapto, PhD.



Training ini terlaksana atas kerjasama antara Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta dan Norwegian Center for Human Rights (NCHR) Universitas Oslo, Norwegia.

## Diskusi Rutin Akhir Bulan

### A. Latar Belakang

Intelektualisme menjadi kebutuhan mendasar para pekerja sosial dan para aktifis hak asasi manusia. Semangat intelektualisme urgen karena muatan teorisasi sosial sehingga perjuangan akan memiliki basis pencerahannya masing-



masing. Semangat intelektualisme berbeda dengan semangat perjuangannya massa. Intelektualisme melandaskan pada ilmu, sedangkan massa lebih pada komunitas yang berkerumun, cenderung tanpa pijakan dan gampang tersulut. Intelektualisme menghendaki

komunikasi-argumentatif, sedangkan massa cenderung menghendaki kekerasan dan pemaksaan. Habermas mengatakan masyarakat komunikatif bukanlah masyarakat yang melakukan kritik melalui kekerasan, melainkan lewat argumentasi-argumentasi rasional.

Kuntowijoyo memberikan penegasan teoritis tentang fase-fase perjuangan dalam kesejarahan. Menurut Kunto, fase sejarah saat ini bukanlah mitos dan ideologis, tetapi telah masuk pada fase kesejarahan ilmu. Realitas saat ini tidak lagi dapat dibangun dengan basis-basis yang mistis dan ataupun sekedar dikutubkan pada blok-blok ideologis, tetapi sejarah kekinian harus dikonstruksi melalui rasionalisasi dan diobjektifikasi

tend to violence and coercion. Habermas stated that communicative society is not community that criticizes through violence, but through rational arguments. Kuntowijoyo provide theoretical confirmation of struggle phases in the history. According to him, the recent phase of history is not mythical and ideological, but rather entered the phase of historical science. Current reality can no longer be built with a mystical bases and or just base on ideological blocs, but contemporary history should be constructed through the rationalization and objectivity between social values and facts. Indirectly Kuntowijoyo recommend that the advocacy work of social and human rights activists is not



Intellectualism becomes a fundamental requirement of social workers and human rights activists. The spirit of intellectualism is urgent because of its social theory strength that provide respective basis of enlightenment. The spirit

of intellectualism is different from the spirit of mass struggle. Intellectualism bases on science while the mass bases on crowd, more without foundation and could easily provoked. Intellectualism requires argumentative communication, while the masses

### A. Background

## Regular Monthly Discussion

expected to provide exemption will then always live in prolonged irony. Activists' social and human rights struggles need a theoretical basis that ontological, epistemic, strategic and critical. From such weaknesses and anomalies, the Centre for Human Rights Studies of UJI take the role in transformative efforts by holding regular discussions on Saturday in the end of every month in 2010. It is expected to become a theoretical reinforcement of the social science, human rights, data, as well as maintaining good relationship among humanitarian activists of the Center and other human rights activists in Yogyakarta, including victims, students, social movement, mosques caretaker, NGOs, CSOs, and the academics. Moreover, this discussion activity is expected to accommodate activists' social anxiety and have a social responsibility towards the society.

enough to mystify past histories and or merely rely on ideological blocs without an objective rationalization. Advocacy and struggles today requires knowledge, valid data, networking, and the rational grounding of such humanitarian advocacy work. The lack of presence of advocacy generation which is grounded to minimum science is visible from two things, first, the presence of a group of activists to make changes but do not have a data basis and a strong knowledge in their work. Second, the presence of a group of activists who have the knowledge and expertise in managing the data but was not moved scientifically to involve in humanitarian advocacy. These situations are activists' anomalies and distortions that will certainly hamper the realization of humane order in the future. Oppressed civil society will always be faced with another new form of oppression. The activists that are

antara nilai dan fakta-fakta sosialnya. Secara tidak langsung Kuntowijoyo merekomendasikan bahwa kerja-kerja advokasi para aktifis sosial dan hak asasi manusia saat ini tidaklah cukup dengan memistifikasi kesejarahan masa lalu dan ataupun sekedar mengandalkan blok-blok ideologis tanpa rasionalisasi yang obyektif. Advokasi dan perjuangan saat ini membutuhkan pengetahuan, kekuatan data, jejaring, dan pendasaran yang rasional dari kerja-kerja advokasi kemanusiaan tersebut.

Krisis belum hadirnya generasi advokasi yang berpijak pada ilmu minimal terlihat dari dua hal, *pertama*, hadirnya sekelompok aktifis untuk melakukan perubahan tetapi tidak punya basis data dan pengetahuan yang kuat dalam kerja-kerja perjuangannya. *Kedua*, hadirnya sekelompok aktifis yang mempunyai pengetahuan dan keahlian dalam mengelola data

tetapi tidak bergerak secara ilmu dalam melakukan advokasi kemanusiaan. Situasi-situasi ini ialah anomali dan distorsi aktifis yang tentu akan menghambat perwujudan tatanan kemanusiaan kedepan. Masyarakat sipil yang tertindas akan selalu dihadapkan dengan penindasan baru. Para aktifis yang diharapkan dapat memberikan pembebasan selalu hidup dalam ironi-ironi yang berkepanjangan. Perjuangan sosial dan hak asasi manusia para aktifis butuh basis teoritis yang ontologis, epistemis, strategis dan kritis.

Berangkat dari kelemahan dan anomali-anomali itulah, Pusat Studi HAM UJI mengambil perannya yaitu usaha tranformatif dengan mengadakan diskusi rutin setiap Sabtu akhir bulan. Kegiatan diharapkan akan menjadi penguat teorisasi ilmu sosial, hak asasi manusia, data, dan penyambung silaturahmi antar para aktifis kemanusiaan di internal Pusat Studi

HAM UII dan para aktifis di Yogyakarta pada umumnya, baik itu para korban, mahasiswa, gerakan sosial, takmir masjid, LSM, Ormas, dan para akademisi.

Lebih dari itu, diskusi rutin ini diharapkan akan menjadi penyambung kegelisahan sosial para aktifis sehingga selalu akan

terpanggil, tergerak dan mempunyai tanggungjawab sosial terhadap permasalahan-permasalahan umatnya.

**B. Deskripsi**

Diskusi bulanan ini dilaksanakan setiap akhir bulan pada hari Sabtu. Tema-tema diskusi yang diangkat terkait dengan persoalan sosial dan hak asasi manusia, dikaji secara teoritis dan praktik, dilihat dalam

perspektif *human rights movement*, dan ataupun *share situasi-kondisi kemanusiaan kontemporer*. Diskusi ini

menghadirkan satu sampai dengan dua orang pembicara yang terlibat, kompeten di bidangnya dan akan dipandu oleh seorang moderator. Masing-masing pembicara akan mempresentasikan materi dan pengalamannya sekitar 20 s/d 25 menit, selebihnya dipergunakan untuk tanya jawab, *sharing* dan berbagi peran aksi-aksi kemanusiaan pasca diskusi dilaksanakan.



B. Deskripsi

This monthly discussion held each end of the month on Saturday. The themes of discussion related to social issues and human

rights, both theoretical and practical study, from human rights movement perspective and or sharing of contemporary rights condition. This discussion presents one to two speakers who are competent in their expertise and guided by a moderator. Each speaker will present the materials and experiences about 20 to 25 minutes; the rest is used interactive dialogue, share experiences and role in future humanitarian actions.

**C. Results**

1. Day, date : Saturday, January 30, 2010

Topic

Frait Human Rights Enforcement and Today National Human Rights Commission

Speaker

- Ifdhal Kasim, S.H. (Chairman of Komnas HAM)

Existence

Time

: 13.30-onward

Commission

Human Rights

Enforcement and

Today National

Human Rights

Commission

Existence

Time

: 13.30-onward

Speaker

- Ifdhal Kasim, S.H. (Chairman of Komnas HAM)



Time : 09.00-onward  
Clogged?  
Gross Violations  
Human Rights  
Topic : Why Settlement  
29, 2010  
Day, date : Saturday, May  
5. Moderator : M. Syaff'ie, S.H.  
Yogyakarta)  
Wijiyati (IDEA  
- Valentina Sri  
Manunggal)  
(Director of Driya  
Purwanta, M.Pd  
- Setya Adi  
Speaker : - Setya Adi  
Time : 09.00-onward  
Indonesia  
Access to Justice  
Topic : The Death of  
24, 2010  
Day, date : Saturday, April  
4. Moderator : M. Syaff'ie, S.H.  
Activist)  
(Political Party  
S. S I , A p t  
- Imam Sujangi,  
(Director of ICM)  
Speaker : - Tri Wahyu K.H.

Time : 09.00-onward  
Politics Brokers  
Case-Brokers and  
Right because of  
Topic : Torn Justice  
27, 2010  
Day, date : Saturday, March  
3. Moderator : M. Syaff'ie, S.H.  
University)  
Gadjah Mada  
M.SI (Sociologist  
- Ari Sudjito,  
Aid)  
Yogyakarta Legal  
M.H. (Director of  
Thamrin, S.H.,  
Speaker : - M. Irsyad  
Time : 09.00-onward  
City of Education  
Violation in the  
Topic : Human Rights  
February 27, 2010  
Day, date : Saturday,  
2. Moderator : M. Syaff'ie, S.H.  
Yogyakarta)  
DIAN/Interfidei  
(Director of  
- Elga Sarapung  
Speaker

C. HASIL

1. Hari : Sabtu, 30 Januari  
2010  
Tema : B u r a m n y a  
Penegakan HAM  
dan Eksistensi  
Komnas HAM Kini  
Waktu : 13.30-selesai  
Pembicara : - Ifdhal Kasim,  
S.H. (Ketua  
Komnas HAM)  
- Elga Sarapung  
(Direktur  
DIAN/Interfidei  
Yogyakarta)  
Moderator : M. Syaff'ie

2. Hari : Sabtu, 27  
Pebruari 2010  
Tema : Pelanggaran-  
Pelanggaran HAM  
di Kota  
Pendidikan  
Waktu : 09.00-selesai  
Pembicara : - I r s y a d  
Thamrin, S.H,  
M.H (Direktur  
LBH Yogyakarta)

- Ari Sujito, M.SI  
(Sosiolog UGM)  
Moderator : M. Syaff'ie

3. Hari : Sabtu, 27 Maret  
2010  
Tema : Hak Keadilan  
yang Terkoyak  
Akibat Markus  
dan Marpol  
Waktu : 09.00 -selesai  
Pembicara : - Tri Wahyu K.H  
(Direktur ICM)  
- Imam Sujangi,  
S.Si, Apt (Aktifis  
Partai Politik)  
Moderator : M. Syaff'ie

4. Hari : Sabtu, 24 April  
2010  
Tema : Matinya akses  
Atas Hukum dan  
Keadilan di  
Indonesia  
Waktu : 09.00-selesai  
Pembicara : - Setya Adi  
Purwanta, M.Pd  
(Direktur Driya  
Manunggal)

- Valentina Sri Wijiylati (IDEA Yogyakarta)  
 Moderator : M. Syaff'ie  
 5. Hari : Sabtu, 29 Mei 2010  
 Tema : Mengapa Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Macet?  
 Waktu : 09.00-selesai  
 Pembicara : - Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si (Direktur Pusham UII)  
 - Yetti (Sekretaris Jenderal IKOHI Jakarta)  
 Moderator : Eko Riyadi  
 6. Hari : Sabtu, 26 Juni 2010  
 Tema : Problem Pelayanan Publik Di Indonesia  
 Waktu : 09.00-selesai

Pembicara : - Moh. Hasyim, S.H. (Ketua LOD Provinsi DIY)  
 - Syamsuddin, S.H. (Koordinator EKOSOB LBH Yogyakarta)  
 Moderator : Kelik Sugiarlo, S.H.  
 7. Hari : Sabtu, 31 Juli 2010  
 Tema : Pelanggaran HAM dalam Kasus Terorisme  
 Waktu : 09.00-selesai  
 Pembicara: - Eko Prasetyo, S.H. (Direktur Program Pusham UII)  
 - Ustadz Sobbarin Syakur (Sekjen Majelis Mujahidin Indonesia)  
 Moderator: M. Syaff'ie  
 8. Hari : Sabtu, 28 Agustus 2010  
 Tema : Komando Jihad dan Problem Independensi

7. Day, date : Saturday, July 31, 2010  
 Topic : Human Rights Violations in Terrorism Case  
 Time : 09.00-onward  
 Speaker : - Eko Prasetyo, S.H. (Program Director of Pusham UII)  
 - Ustadz Sobbarin Syakur (Secretary General of Majelis Mujahidin Indonesia)  
 Moderator : M. Syaff'ie, S.H.  
 Day, date : Saturday, August 28, 2010  
 Topic : Jihad Command and the Problem of Indonesian Justice Independence  
 Time : 15.00-onward  
 Speaker : - Dr. M. Busyro Mudaddas, S.H., M.Hum (Chairman of Judicial Commission)

7. Speaker : - Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si (Director of Pusham UII)  
 - Yetti (Secretary General of IKOHI Jakarta)  
 Moderator : Eko Riyadi, S.H.  
 Day, date : Saturday, June 26, 2010  
 Topic : Public Service Problems in Indonesia  
 Time : 09.00-onward  
 Speaker : - Moh. Hasyim, S.H. (Chairman of Yogyakarta Province Local Ombudsman)  
 - Syamsuddin, S.H. (Coordinator EKOSOB LBH Yogyakarta)  
 Moderator : Kelik Sugiarlo, S.H.